

# Filsafat Pancasila dalam Kehidupan Budaya Bangsa

*M. Sastrapratedja, S.J.*

Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan  
Staf Pengajar S2 Program Studi Ilmu Filasfat UGM

Sebagaimana kebudayaan, filsafat mempunyai banyak pengertian. Dengan “Filsafat Pancasila” dimaksudkan suatu pertanggungjawaban dan penjelasan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara secara komprehensif dan mendasar. Karena Pancasila merupakan dasar negara atau ideologi negara, maka Pancasila berfungsi memberi arah pada tindakan dan pembentukan struktur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu tujuan dari refleksi filsafat atas Pancasila memuat dua dimensi yaitu dimensi kognitif dan moral

Dimensi kognitif menuntut pemahaman yang mendalam dan luas dari Pancasila dihadapkan kenyataan yang terus berkembang. Dimensi *moral* menuntut bahwa refleksi itu diarahkan untuk dapat membantu merumuskan kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab lembaga-lembaga, kelompok masyarakat dan warganegara dalam kerangka hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana setiap ideologi bertujuan untuk mendorong ke arah suatu tindakan atau praksis, demikian juga refleksi atas ideologi

negara diarahkan agar setiap warganegara dapat melihat dengan lebih jelas permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara dan dengan demikian juga dapat menemukan pemecahannya.

Dalam kaitan ini maka Filsafat Pancasila lebih dari sekedar permenungan melulu tetapi harus memiliki aspek praktis, yaitu terarah pada praksis atau terarah pada penumbuhan komitmen moral pada nilai-nilai Pancasila.

Kebudayaan dapat dimengerti dan dipelajari dari berbagai aspek dan disiplin

ilmu. Secara deskriptif kebudayaan dapat digambarkan dalam beberapa lapisan. *Lapis pertama* adalah "alat-alat" yaitu segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, termasuk segala bentuk teknologi dari yang sederhana sampai yang canggih, serta ilmu pengetahuan. Kebudayaan dalam lapis ini bersifat kumulatif dan dapat dialihkan dari satu masyarakat kepada masyarakat lainnya. *Lapis kedua* adalah "etos" masyarakat, yaitu kompleks kebiasaan, sikap-sikap terhadap masa lampau, alam dan kerja. *Lapis Ketiga* adalah "inti, hati" atau menurut Dussel adalah "inti etikomitis" dari suatu kebudayaan, yaitu pemahaman diri masyarakat, cara bagaimana masyarakat menafsirkan dirinya, sejarahnya dan tujuan-tujuannya. Tanpa inti ini, suatu kebudayaan tidak memiliki kesatuan dan integritas. Lapis-lapis itu bukan merupakan susunan yang statis, tetapi terjadi interaksi antara lapis-lapis itu, antar budaya yang satu dengan lainnya. Perubahan pada lapis pertama: teknologi, industri, ekonomi membawa perubahan pada lapis kedua yaitu etos budaya. Sebaliknya etos budaya dapat menunjang atau menghambat perubahan pada lapis pertama. Kerap kali untuk berhasilnya perkembangan pada lapis tersebut perlu pengembangan institusi etos budaya baru. Selanjutnya dapat dipertanyakan sejauh mana lapis ketiga tersentuh oleh perubahan pada lapis pertama dan kedua. Perubahan dari masyarakat agrikultural menuju masyarakat industrial tentu membawa perubahan etos budaya, atau jika belum terjadi dibutuhkan suatu perangkat etos budaya bagi berhasilnya masyarakat industrial. Manakah etos budaya masyarakat Indonesia? Usaha untuk mengidentifikasi hal ini telah banyak dilakukan. Namun yang juga perlu diteliti adalah manakah "inti" kebudayaan Indonesia yang oleh Victor Turner disebut dengan *root paradigms*.

Sebagai bahan refleksi kita ambil beberapa aspek budaya.

## 1. IDENTITAS BUDAYA <sup>1)</sup>

Manusia membentuk dirinya dan menafsirkan identitas dirinya dalam interaksi dengan lingkungan budayanya. Dalam dunia modern yang antara lain ditandai dengan munculnya negara kebangsaan - kebudayaan nasional merupakan salah satu sumber identitas budaya. Dalam mendefinisikan diri dikatakan "kami bangsa Indonesia". Ernest Gellner mengatakan:

*"Seorang harus memiliki suatu kebangsaan sebagaimana ia memiliki hidung dan telinga. Hal ini sangat jelas, meskipun tidak benar begitu. Bahwa hal demikian dirasakan benar, memang merupakan suatu aspek, mungkin bahkan inti masalah nasionalisme. Memiliki suatu bangsa bukan suatu yang melekat pada kemanusiaan, tetapi sekarang nampaknya begitu".<sup>2)</sup>*

Barangkali hal tersebut juga menerangkan adanya kecenderungan chauvinisme, atau nasionalisme yang sempit dan fanatik.

Masalahnya di sini adalah bahwa identitas nasional bukan sifat bawaan sejak lahir (tidak ada dalam gen kita), tetapi sesuatu yang kita bentuk dan transformasikan dalam interaksi dengan lingkungan dan dalam hubungan dengan gambaran yang disajikan pada kita. Kita hanya mengetahui "keindonesiaan" karena "keindonesiaan" itu digambarkan kepada kita sebagai suatu "rangkaiannya makna," yaitu sebagai kebudayaan nasional Indonesia. Suatu bangsa bukan hanya suatu entitas politik, tetapi sistem budaya yang menghasilkan makna-makna. Suatu bangsa adalah suatu komunitas simbolik yang mampu menumbuhkan rasa identitas dan kesetiaan. Dengan terbentuknya negara kebangsaan, kesetiaan pada ikatan-ikatan primordial yang lebih sempit ditransformasikan ke dalam ikatan pada bangsa yang menjadi sumber makna identitas budaya.

Kebudayaan nasional tidak hanya terdiri atas institusi-institusi budaya (pendidikan, bahasa, ideologi dan lain-lain), tetapi juga simbol dan gambaran. Kebu-

dayaan nasional adalah suatu *wacana* yaitu suatu cara mengkonstruksikan makna yang mempengaruhi dan mengatur tindakan dan persepsi diri kita. Seperti dikatakan Benedict Anderson, identitas nasional adalah suatu *imagined community*.<sup>3)</sup> Kebudayaan Nasional mengkonstruksikan identitas dengan melahirkan makna tentang bangsa. Ada berbagai unsur yang terdapat di sini :

1. Narasi bangsa yang berulang-ulang dikisahkan dalam sejarah nasional, kesusastraan, media. Narasi ini menyediakan kisah, gambaran, peristiwa sejarah, simbol nasional dan berbagai ritual yang menggambarkan pengalaman bersama, penderitaan, kemenangan yang memberi makna pada bangsa. Sebagai anggota *imagined community* kita melihat diri kita ambil bagian di dalamnya.

2. Unsur kedua dari kebudayaan nasional itu adalah tekanan pada kesamaan asal, tradisi dan keabadian, kesinambungan. Bangsa Indonesia berasal dari nenek moyang yang sama; kita yang hidup pada abad 20 ini adalah merupakan penerusan dari kerajaan Majapahit, misalnya.

3. Wacana ketiga adalah apa yang disebut "penemuan tradisi", yaitu usaha untuk mengkonstruksikan suatu tindakan simbolik di masa sekarang yang dianggap berasal dari masa lalu. Hal itu dapat dilihat dalam peringatan hari-hari nasional lainnya.

Ada unsur-unsur lain seperti berbagai mitos tentang asal-usul bangsa, atau perbedaan-perbedaan dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia mempunyai sifat dan watak yang berbeda.

Bisa terjadi kebudayaan nasional itu menjadi regresif, kembali ke kejayaan masa lalu untuk menghindari masa kini atau untuk menjawab ancaman terhadap identitas.

Ada beberapa tantangan terhadap kebudayaan nasional atau identitas budaya nasional. Tantangan itu terutama datang dari proses globalisasi yang membawa serta relativisasi identitas diri dan homogenisasi atau universalisasi unsur-unsur budaya, yang dengan mudah diadopsi.

Sarasehan "Pendidikan Wawasan Kebangsaan" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Strategi dan Pembangunan (LPSP) pada tanggal 10 Agustus 1984 di Jakarta, pada akhir diskusi menyimpulkan pentingnya peninjauan kembali pendidikan Wawasan Kebangsaan. Ada 6 butir yang kiranya perlu dikemukakan di sini:

1. Konsentrasi global dan kondisi nasional mengakibatkan wawasan kebangsaan dewasa ini menjadi pokok keprihatinan yang mendesak untuk segera ditangani.

2. Wawasan kebangsaan ini perlu ditangani dalam kaitannya dengan dimensi lokal, regional, dan global.

3. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelbagai dimensi tersebut mendorong perlunya diadakan perumusan ulang wawasan kebangsaan, sehingga menjadi bermakna dan pantas untuk dibela dan dipertahankan. Untuk itu diperlukan sikap yang rasional dan terbuka.

4. Dewasa ini wawasan kebangsaan yang relevan menuntut muatan nilai-nilai dasar yang diilhami iman dan takwa yang keluar dari hati nurani, menghargai harkat dan martabat manusia, mewujudkan solidaritas sosial, menjunjung tinggi demokrasi, serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Wawasan kebangsaan dewasa ini dituntut pula untuk menghargai hak-hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

5. Pendidikan wawasan kebangsaan dirasakan sebagai usaha yang mendesak untuk mengatasi kemerosotan penghayatan dan pengamalan wawasan tersebut terutama sebagai akibat proses sosial yang terjadi selama ini.

6. Pendidikan wawasan kebangsaan yang diperlukan adalah pendidikan yang mampu menumbuhkan pemahaman, sikap dan tekad yang seimbang, antisipatif, dan dialogis terhadap lingkungan alam, sosio-kultural dan diri sendiri melalui panduan dari empat materi pokok, yaitu sejarah nasional, situasi nasional kontemporer, situasi negara-negara lain, dan berbagai proyeksi mengenai masa depan.<sup>4)</sup>

## 2 DIMENSI BUDAYA DARI EKONOMI

Pada dewasa ini dua ideologi besar, yaitu kapitalisme dan sosialisme sudah tidak lagi merupakan dua ideologi alternatif yang saling bersifat eksklusif, sebagaimana terjadi pada waktu Pancasila dirumuskan. Kedua ideologi meskipun masih mempertahankan prinsip dasarnya, tetapi dalam perkembangan dan operasionalisasinya telah menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kondisi yang berbeda-beda. Bahkan masing-masing telah berusaha menjawab kritik dari masing-masing pihak.

Pada saat ini konfrontasi ideologi antara kapitalisme dan sosialisme telah kehilangan arti, dan yang lebih dominan adalah berkembangnya varian-varian kapitalisme, khususnya kapitalisme yang bercorak individualistik, yaitu kapitalisme Inggris dan Amerika di satu pihak dan kapitalisme yang bercorak komunitarian, yaitu kapitalisme Jepang dan Jerman. Varian kapitalisme tersebut menjelang abad 21 ini memasuki tahap kompetisi.

Dalam era liberalisasi perdagangan yang akan dimasuki Indonesia pada abad 21, tak dapat tidak kapitalisme akan menjadi dominan.

Kapitalisme tidak hanya merupakan sistem ekonomi, tetapi juga didukung sistem budaya tertentu untuk mengantisipasi, kiranya perlu disadari adanya corak-corak kapitalisme dengan latar belakang budaya berbeda.

Kapitalisme didasari oleh beberapa prinsip: (1) *Individualisme* dan *kebebasan*; individualisme merupakan bahwa individu lebih penting dari pada masyarakat dan pranata-pranatanya. Pranata sosial diadakan untuk melindungi kepentingan dan kebebasannya. Individu memiliki kebebasan untuk mewujudkan dan memajukan kepentingannya. Dalam bidang ekonomi ini berarti bahwa individu mempunyai hak milik dan bebas untuk mengadakan kontrak dengan orang lain, menjual dan membeli produk serta keahlian, apabila diinginkan. (2) Individu mempunyai hak milik dan *hak keuntungan*. Penggunaan hak milik untuk tujuan

produktif akan menghasilkan keuntungan dan berguna. Keuntungan akan mendorong penggunaan hak milik secara lebih produktif dan pada gilirannya akan menguntungkan masyarakat. (3) *Kesamaan kesempatan* bagi setiap orang merupakan titik awal untuk meraih kemajuan dan mengadakan persaingan. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa "semua orang diciptakan sama", (*All men are created equal* - Thomas Jefferson). Meskipun kesempatan kesamaan (*equal opportunity*) tidak merupakan kenyataan, namun ideologi ini menjadi pendorong dari berbagai tuntutan khususnya pada tahun 1960-an dan 1970-an dari berbagai kelompok, akses yang sama bagi pekerjaan, perumahan, pendidikan, prasarana umum, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. (4) *Kompetisi* atau persaingan: bila masyarakat dapat mencapai cita-cita "kesempatan yang sama" bagi semua maka warganegara yang paling berbakat, paling terampil, dan paling ambisius dengan sendirinya akan memperoleh kemajuan paling besar. Bagi ideologi ekonomi, kompetisi merupakan bagian sistem bisnis yang teramat penting. Kompetisi mengendalikan dasar bertolak yang sama, yaitu *equal opportunity*. Kompetisi merupakan saluran kecenderungan individu untuk mencapai prestasi yang terbatas. Adam Smith menyebutkan sebagai "*unseen hand*" yang mengarahkan kegiatan pasar bebas. Dalam sistem ekonomi yang semakin kompleks, "*visible hand*" dari pemerintah kerap kali menggantikan kompetisi sebagai pengatur bisnis. Dalam negara kapitalis peraturan pemerintah mengendalikan kompetisi yang tidak sehat. (5) Max Weber mengkaitkan kemajuan pertumbuhan dan perkembangan kapitalisme dengan "*etika protestan*". Etika protestan adalah motivasi yang mendorong orang untuk mencari kemakmuran dan keuntungan, karena hal itu merupakan rahmat dari Allah. Motivasi itu adalah kerja keras, perencanaan sistematis, menabung reinvestasi keuntungan. Menurut Weber dengan perubahan sosial - budaya, motivasi religius itu akan memudar; motivasi mencari keuntungan tidak lagi bersifat

religius dan tetapi tetap hidup sebagai pendorong kapitalisme. Tesis Weber itu banyak diperdebatkan. Tetapi untuk keberhasilan sistem ekonomi kapitalis, etos kerja, yaitu sikap-sikap seperti hemat, menghargai waktu, orientasi ke masa depan, dorongan bersaing dan lain-lain, berperan besar. (6) *Hukum alam* "penawaran dan permintaan" dan "intervensi" pemerintah secara terbatas merupakan prinsip kapitalisme. Sistem ekonomi harus dibiarkan bekerja secara alamiah: "*Laissez faire*". Semboyan "*that government is best which governs least*" adalah prinsip kapitalisme yang penting. Tugas pemerintah adalah melindungi hak milik, menjamin berlakunya kontrak, dan menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Prinsip-prinsip kapitalisme tersebut dalam perkembangannya tak dapat dilaksanakan secara konsisten. Kapitalisme harus mengadakan adaptasi terhadap berbagai keadaan. (1) Kapitalisme berusaha menjawab kritik Marxisme dan sosialisme. Kesenjangan kelas harus dikurangi dengan menerapkan konsep *welfare state* dan dengan berkembangnya kelas menengah. (2) Hak milik dan keuntungan dibatasi dengan cara menarik pajak. (3) Didasari bahwa prinsip kesamaan (equality) hanya menjadi nyata kalau disertai dengan usaha pemerataan. (4) Berbagai peraturan pemerintah menghindarkan persaingan yang tidak sehat. (5) Etos kerja tidak hanya berkembang pada kalangan tertentu, tetapi meluas ke berbagai lapisan masyarakat. (6) Mekanisme pasar bebas perlu diatur, sehingga terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Dengan demikian kapitalisme terus menerus mengalami perubahan disebabkan oleh perkembangan kehidupan ekonomi, munculnya konsumen baru, metode produksi baru, pasar baru, bentuk-bentuk organisasi industrial baru dan juga kondisi sosial-budaya masing-masing negara. Lester Thurow dalam *Head to Head The Coming Economic Battle Among Japan, Europe and America*<sup>5)</sup> meringkaskan situasi baru sebagai berikut:

"Abad 19 dikenang sebagai abad

*Kerajaan Inggris. Ia merupakan kekuatan ekonomi yang terbesar. Abad 20 akan dikenang sebagai abad Amerika Serikat. Ia merupakan dan masih merupakan kekuatan ekonomi yang dominan. Menurut kalender, abad 21 belum mulai, tetapi ahli sejarah ekonomi yang akan datang dengan melihat ke belakang akan menempatkan akhir abad 20 sedikit lebih awal. Seperti halnya runtuhnya Tembok Berlin pada bulan November 1989 menandai akhir persaingan kapitalisme dan komunisme, demikian juga integrasi Pasar Bersama Eropa, pada tanggal 1 Januari 1993 menandai awal persaingan ekonomi baru di abad baru pada permulaan Millenium ke tiga. Pada saat itu, untuk pertama kali setelah lebih dari satu abad, Amerika Serikat akan menjadi simbol untuk awal kompetisi yang akan menentukan siapa yang akan memiliki abad 20".*

Thurow menunjukkan bahwa persaingan yang terjadi antar kekuatan besar itu tidak dapat dibandingkan dengan peperangan militer. Permainan ekonomi yang akan dipentaskan pada abad 21 antara komunisme dan kapitalisme telah berakhir, tetapi telah muncul dua bentuk kapitalisme. Kapitalisme komunitarian Jerman dan Jepang. Satu menekankan nilai-nilai individualistik dan yang lain menekankan nilai-nilai komunitarian sebagai jalan menuju keberhasilan ekonomi.

Pada saat ini Pancasila lebih banyak dihadapkan pada tantangan berbagai varian kapitalisme dari pada komunisme atau sosialisme. Hal tersebut disebabkan karena perkembangan kapitalisme yang bersifat global. Pancasila memberikan orientasi bagi terciptanya sistem ekonomi yang memperhatikan:

1). Dimensi etis; sila pertama dan kedua mengandung imperatif etis untuk menghormati martabat manusia dan memperlakukan manusia sesuai dengan keluhuran martabatnya. Ini berarti bahwa manusia tidak boleh dieksploitir untuk mencapai tujuan tertentu.

2). Sila persatuan sebagai bangsa mengandung implikasi keharusan menga-

tasi segala bentuk sektarianisme, yang berarti pula komitmen kepada nilai kebersamaan seluruh bangsa.

3). Nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi konstitusional; persamaan politis, hak-hak asasi manusia dan kewajiban kewarganegaraan.

4). Keadilan sosial yang mencakup persamaan dan pemerataan.

Prinsip-prinsip tersebut perlu diterapkan dalam mengatur ekonomi.

### 3. INDUSTRIALISASI

Berkembangnya kapitalisme sebagai kekuatan tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan industrialisasi.

Industrialisasi merupakan proses terbentuknya masyarakat industrial. Industrialisasi mencakup lebih dari ekspansi sektor sekunder dari suatu sistem ekonomi. Istilah industrialisasi mencakup mekanisasi dan organisasi rasional kegiatan-kegiatan produktif dalam semua sektor ekonomi. Ada lima komponen esensial dalam industrialisasi: teknologi mesin, marketing dari tenaga kerja, konsentrasi kaum pekerja dalam suatu usaha, adanya suatu kelompok sosial tertentu, yaitu pengusaha, dan pasar yang selalu meluas. Dengan demikian industrialisasi merupakan transisi dari metode produksi yang berorientasi pada subsistensi, dan swadaya kepada sistem produksi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan organisasi yang rasional. Industrialisasi biasanya disertai dengan modernisasi yaitu perubahan sosial-politik, diantaranya urbanisasi, perubahan struktur pekerjaan, mobilitas sosial, perkembangan pendidikan, dan perubahan politik ke arah demokratisasi dan egalitarian.

Industrialisasi juga mengakibatkan dan juga memprasyaratkan terciptanya kebudayaan industrial, seperti cara hidup yang dicirikan oleh mobilitas, disiplin, ketepatan waktu, kehandalan, ketepatan dalam memainkan peran yang ditentukan oleh sistem produksi. Industrialisasi juga menciptakan kondisi materiil dan kebutuhan baru; merangsang adopsi sikap-sikap baru,

dan menghasilkan pembagian kerja baru serta pertukaran jasa; peranan organisasi dan sistem kegiatan baru semakin berdiferensiasi. Muncul pula peran-peran kunci baru dalam masyarakat seperti pengusaha, pekerja, inovator dan sebagainya. Ada pula persyaratan-persyaratan institusional, termasuk dapat dialihkan hak-hak milik, mobilitas pekerja, sistem pertukaran komersial, mekanisme politik untuk menjamin stabilitas. Dituntut pula adanya orientasi pemecahan masalah, yaitu institusionalisasi rasionalitas. Kerapkali proses demikian itu disebut modernitas industrial<sup>6)</sup>

Beberapa aspek tahap pasca-industrial telah berkembang di Indonesia. Kalau tahap praindustrial didominasi oleh pertanian, dan tahap industrial oleh manufaktur, tahap pasca-industrial yang sedang memasuki sebagian perekonomian Indonesia lebih ditandai oleh ekonomi jasa. Di dalam tahap industrial yang masih terus berlangsung kekuatan penggerak utama adalah produksi dan keuntungan atau pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan energi dan mesin. Di dalam masyarakat pasca-industrial kekuatan pendorong adalah ilmu pengetahuan dan informasi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan pemrosesan informasi merangsang pertumbuhan ekonomi. Keduanya menjadi sumber inovasi dalam organisasi dan manajemen ekonomi. Di samping teknologi yang mentransformir dan mengotomasi produksi barang, ekonomi pasca-industrial menghasilkan informasi itu sendiri.

Teknologi informasi baru memungkinkan tingkat profit dengan berbagai cara, antara lain:

(a) Teknologi informasi meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan mesin berbasis mikro-elektronik yang mentransformir proses produktivitas.

(b) Teknologi informasi menciptakan desentralisasi produksi dan pemisahan spatial berbagai unit perusahaan sementara produksi dan manajemen tetap terintegrasi dengan menggunakan telekomunikasi dan sistem manufaktur yang fleksibel.

#### 4. ADAPTASI BUDAYA

(c) Dengan otomatisasi proses dimungkinkan penggunaan tenaga kerja secukupnya sehingga otomatisasi layak dan mendatangkan untung.

(d) Teknologi informasi menempatkan modal dalam posisi yang kuat berhadapan dengan tenaga kerja.

(e) Internasionalisasi atau globalisasi ekonomi tak akan terjadi tanpa terobosan teknologi informasi.<sup>7)</sup>

Perubahan-perubahan ke arah pasca-industrial antara lain terlihat, pertama, dalam pergeseran *jenis pekerjaan*. Kerja ditransformasi menjadi manakala pengetahuan membawa berkurangnya kerja manual atau manufaktur. Sektor jasa merupakan suatu sumber kerja non-manual yang menuntut kreatifitas dan kemampuan membangun hubungan sosial. Orang tidak hanya mengoleh barang-barang, tetapi bekerja *dengan* orang lain untuk memberikan jasa. Gejala kedua, adanya perubahan struktur pekerjaan (okupasi) yaitu ketrampilan yang menuntut "kekuatan fisik" semakin berkurang dan diganti dengan pekerjaan profesional yang menurut pekerjaan "berpikir". Gejala terakhir adalah bertambah pentingnya peranan kaum elit yang menguasai ilmu pengetahuan (*knowledge elite*). Pekerjaan intelektual semakin menjadi terspesialisasi.

Di dalam masyarakat informasi ilmu pengetahuan telah menggantikan kerja sebagai sumber nilai yang menghasilkan untung. Ilmu pengetahuan memiliki potensi untuk mentransformir kegiatan apapun di bidang ekonomi. Di samping sebagai sumber daya, informasi juga menjadi komoditi yang membuka sektor baru dalam ekonomi modern. Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat informasi merupakan salah satu perubahan kualitatif masyarakat. Dari sisi ini maka dapat dikatakan juga bahwa perkembangan ekonomi yang akan datang lebih ditandai oleh peran ilmu pengetahuan dan informasi sebagai sumber dinamika, daripada dominasi salah satu sektor ekonomi.

Dari uraian dari berbagai aspek budaya tersebut di atas maka kebudayaan dapat pula dimengerti sebagai:

(1) sejumlah pemecahan masalah internal dan eksternal yang diolah secara terus menerus oleh suatu kelompok dan karenanya diajarkan pada anggota masyarakat baru sebagai suatu cara yang benar untuk menangkap, memikirkan, dan merasakan permasalahan yang dihadapi; (2) asumsi-asumsi tentang hakekat realitas, kebenaran, waktu, ruang, hakekat manusia, kegiatan manusia dan hubungan antar manusia; (3) dengan demikian asumsi itu diandaikan dan akhirnya berada di luar kesadaran. Unsur kebudayaan tersebut diekspresikan dalam mitos, simbol, sistem sosial, tradisi dan lain-lain.<sup>8)</sup>

Dalam sejarahnya kebudayaan Indonesia dalam berhadapan dengan berbagai kebudayaan asing selalu mampu mengadakan "tawar-menawar" sehingga dapat terbentuk sintesis budaya baru. Bahkan Pancasila sendiri dapat dianggap sebagai hasil interaksi kebudayaan Indonesia dengan pengaruh global khususnya pengaruh kebudayaan politik modern (kebebasan, demokrasi, keadilan, negara hukum, negara kebangsaan, dan lain-lain). Nilai-nilai universal yang mendasari pembentukan negara modern dekontekstualisasikan dalam situasi Indonesia, sehingga tercipta Pancasila. Masalah Pertemuan kebudayaan bukan masalah mem"filter" atau menyaring tetapi mengolah dalam interaksi yang dinamis sehingga tercipta sesuatu yang baru. Bangsa, wawasan kebangsaan, jati diri bangsa, budaya politik adalah sesuatu yang harus terus menerus dikonstruksikan, karena bukan kenyataan yang mandeg. Setiap kali bangsa Indonesia dihadapkan pada permasalahan baru yang harus dipecahkan seperti realisasi hak-hak asasi manusia, demokratisasi dan keadilan sosial sebagai perwujudan persamaan dan pemerataan. Di situ harus terjadi interaksi antara prinsip-prinsip dasar Pancasila dengan situasi aktual serta pengaruh global.

---

Catatan:

- <sup>1a</sup> Uraian ini bersumber pada, *Modernity and Its Futures*, ed. Stuart Hall, David Held and Tony McGrew, Polity Press, Cambridge, 1992, h. 291 - 299
- <sup>2a</sup> E. Gellner, *Nations and Nationalism*, Blackwell, Oxford, 1983, p. 6.
- <sup>3a</sup> B. Anderson, *Imagined Communities. Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*, Verso, London, 1991.
- <sup>4a</sup> *Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Tantangan dan Dinamika Perjuangan Kaum Cendekiawan Indonesia*, ed. Soerjanto, P. F.M. Parera, Grasindo, Jakarta, 1994, 309-310
- <sup>5a</sup> New York, 1992, h. 24 - 25
- <sup>6a</sup> Hans Christopher Ruge, "Industrialization and Cultural Change", dalam: Rolf E. Vente, Peter S.J. Chen (eds.), *Culture and Industrialization. An Asian Dilemma*, McGraw-Hill, Singapore, 1980, h. 217-236
- <sup>7a</sup> M. Castells, *The Informational City*, Basil Blackwell, Oxford, H. 12-32.
- <sup>8a</sup> W.C. Cunningham, Donn W. Gresco, Cultural Leadership: *The Culture of Excellence in Education*, Allyn and Bacon, Boston, 1993, h. 20.